

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dapat dijadikan acuan bagi seluruh manusia di muka bumi untuk saling bekerja sama dalam menjaga keseimbangan hidup di segala aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama dalam semua aspek kehidupan (Rahman et al., 2014) (Hermawan et al., 2018). Hal ini relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara memadai diharapkan dapat menjadi solusi untuk menjawab tantangan global secara efektif di tahun 2030 (Junius et al., 2020). Pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut menjadi tanggung jawab bagi semua pihak. Berbagai Negara yang tergabung dalam organisasi dunia pun saling bekerja sama untuk menjawab tantangan global dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah Negara Indonesia.

Indonesia di tahun 2022 lalu berkesempatan menjadi presidensi G-20 dengan tema *recover together, recover stronger*. Dengan tema tersebut Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama mencapai pemulihan yang kuat dan berkelanjutan dalam semua aspek kehidupan. Diharapkan juga dapat berdampak terhadap kepedulian semua masyarakat, khususnya para entitas bisnis untuk berfokus pada pencapaian kinerja yang relevan dengan konsep tujuan

pembangunan berkelanjutan. Kinerja entitas bisnis merupakan pencapaian tertinggi perusahaan yang bersumber dari segala aktivitas manajemen yang dijalankan (Busch & Lewandowski, 2018). Ruang lingkup kinerja pada perusahaan pun cukup luas, salah satunya berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan merupakan kemampuan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan secara memadai, yang biasanya berkaitan dengan aliran dana masuk dan dana keluar (Capon et al., 1990). Ada banyak ukuran untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencapai kinerja keuangan, misalnya dari keberhasilan perusahaan dalam mengelola asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan ataupun biaya (Kim et al., 2021). Kemudian dari kemampuan perusahaan dalam menggunakan asset dan modal yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan secara memadai (Xuan, 2021). Ukuran-ukuran kinerja keuangan tersebut berkaitan dengan kemampuan perusahaan mencapai kinerja keuangan di masa sekarang. Ukuran kinerja ini berkaitan dengan aspek operasional perusahaan.

Selanjutnya untuk menilai kemampuan perusahaan bertahan dimasa mendatang dapat dilihat dari pencapaian kinerja keuangan dalam aspek pasarnya (Thuan et al., 2022). Dalam aspek pasar, dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk bertahan dilingkungan yang kompetitif dengan menguasai pangsa pasar secara memadai (Psomas et al., 2017). Melalui aspek pasar juga dapat dilihat pencapaian perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan di lingkungan pasar modal (Altahtamouni, 2017). Perusahaan dengan pencapaian kinerja pasar secara

memadai sangat dimungkinkan dapat mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang (Kraipornsak & Poramapojn, 2021).

Keberhasilan dalam mencapai semua kinerja keuangan perusahaan tersebut tidak terlepas dari dukungan para stakeholder (Investor, konsumsen, pemerintah, dan masyarakat). Di era saat ini, dukungan stakeholder akan di berikan kepada perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis dan mengambil keputusan relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut relevan dengan konsep ESG (*environmental, social, governance*) yang dapat diterapkan oleh entitas bisnis. Konsep ESG merupakan suatu landasan yang dapat digunakan untuk menilai semua aktivitas bisnis perusahaan berdasarkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam rangka mendukung bisnis yang berkelanjutan (Chvátalová & Šimberova, 2013) (Baalouch et al., 2019).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bursa efek Indonesia dalam press release No.048/BEI.SPR/07-2021 bahwa tantangan global mendorong berbagai pihak, salah satunya investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi pada sector yang menerapkan ESG. Hal tersebut didukung dengan hasil survey skala global yang dilakukan oleh BNP Paribas global yaitu adanya peningkatan sebesar 20% investor yang mempertimbangkan aspek sosial sejak terjadinya pandemic covid-19, kemudian sebanyak 79% investor setuju bahwa mempertimbangkan aspek sosial akan berdampak positif terhadap investasi jangka panjang dan manajemen risiko mereka (Oncioiu et al., 2020) (Sætra, 2021) (Park & Jang, 2021).

Diperlukan kerja sama semua pihak untuk mendukung implementasi ESG demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi semua

tantangan global (Machmuddah & Wardhani, 2020) (Almeyda & Darmansya, 2019) (Miklosik et al., 2021). Beberapa upaya pun dilakukan pemerintah Indonesia sebagai bentuk komitmen dalam mendukung penerapan ESG, misalnya dalam lingkungan pasar modal Indonesia dibuktikan dengan bergabungnya bursa efek Indonesia menjadi bagian dalam sustainable stock exchange pada 18 april 2019 dan sebagai task force on climate related financial disclosures supporters pada 15 juni 2021.

Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui OJK (otoritas jasa keuangan) sejak tahun 2017 juga memberikan dukungan dan berharap para entitas bisnis di Indonesia bertanggung jawab untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dengan mewajibkan perusahaan publik untuk membuat laporan sustainability yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan No.51/POJK.03/2017. Kemudian, OJK di tahun 2021 mengeluarkan surat edaran No.16/SEOJK.04/2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan public. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan mengenai pedoman dalam membuat laporan berkelanjutan berdasarkan bentuk dan isi yang relevan dengan konsep ESG.

Ditahun 2022, Kementerian Keuangan dengan dukungan dari UNDP (*United Nations Development Program*) dan bank dunia mengembangkan kerangka dan pedoman ESG yang relevan dengan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*). Pedoman ESG oleh Kementerian Keuangan tersebut juga relevan dengan aturan dan surat edaran yang sebelumnya telah dikeluarkan OJK di tahun 2017 dan 2021.

Dengan disahkannya pedoman ESG ini adalah salah satu langkah penting oleh Kementerian Keuangan Indonesia untuk mendorong entitas bisnis

menerapkan ESG dalam aktivitas bisnisnya. Kementerian Keuangan juga berharap pedoman ESG tersebut dapat menjadi panduan bagi stakeholder perusahaan untuk memastikan setiap aktivitas yang dijalankan perusahaan BUMN ataupun sector swasta agar relevan dengan konsep ESG.

Walaupun pedoman ESG telah disahkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia, namun hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mewajibkan perusahaan untuk menerapkan dan mengungkapkan ESG pada pelaporan yang diperlukan. Dengan demikian, penerapan dan pengungkapan ESG di Indonesia masih bersifat sukarela. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat penerapan ESG secara memadai oleh perusahaan Indonesia.

Dalam hal ini perusahaan Indonesia perlu diberikan pemahaman bahwa keberhasilan perusahaan mencapai kinerja keuangan yang memadai tidak terlepas dari dukungan stakeholder. Dukungan stakeholder hanya akan diberikan pada perusahaan yang mengutamakan konsep keberlanjutan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Wu et al., (2022); Pulino et al., (2022); Koundouri et al., (2021) menemukan ESG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Namun, ada juga beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan hasil berbeda. Seperti penelitian oleh Jeanice & Kim (2023); Liu et al., (2022); Duque-Grisales & Aguilera-Caracuel (2019) menemukan ESG berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Nisa et al., (2023); Atan et al., (2018); Velte (2017) ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa masih ada kontroversi terkait hubungan antara ESG dan kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan penelitian terkait hubungan ESG dan kinerja keuangan perusahaan.

Selain itu, penerapan ESG pada perusahaan Indonesia belum cukup memadai diukur dengan beberapa standar yang bukan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Seperti penelitian oleh Lubis & Rokhim (2021) menemukan implementasi ESG berdasarkan standar GRI pada perusahaan publik di Indonesia masih sangat rendah dan menunjukkan kurangnya tata kelola oleh pemerintah dan otoritas keuangan. Penelitian oleh Jeanice & Kim (2023) menemukan rata-rata penerapan ESG berdasarkan indeks BGK (Bumi Global Karbon) Foundation pada perusahaan Indonesia adalah sebesar 24,7%. Penelitian oleh Nisa et al., (2023) menemukan rata-rata penerapan ESG berdasarkan standar GRI pada perusahaan Indonesia masih rendah.

Hasil penelitian tersebut juga memotivasi penulis untuk menggunakan regulasi dan standar yang dikelola oleh pemerintah Indonesia dalam menilai implementasi dan pengungkapan ESG pada perusahaan Indonesia. Penulis akan menggunakan pedoman ESG oleh Kementerian Keuangan Indonesia sebagai ukuran dalam menilai implementasi dan pengungkapan ESG pada perusahaan Indonesia. Hal tersebut penulis anggap lebih relevan untuk dilakukan dan sekaligus dapat menambah kajian literature baru terkait hubungan ESG dan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan semua latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Environmental, Social, Governance (ESG) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Indonesia: Berdasarkan Pedoman ESG Kementerian Keuangan Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh environmental terhadap kinerja keuangan perusahaan Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh social terhadap kinerja keuangan perusahaan Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh governance terhadap kinerja keuangan perusahaan Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan hasil pengaruh environmental terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia berdasarkan pedoman ESG kementerian keuangan Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendapatkan hasil pengaruh social terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia berdasarkan pedoman ESG kementerian keuangan Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan mendapatkan hasil pengaruh governance terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia berdasarkan pedoman ESG kementerian keuangan Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kajian ekonomi, khususnya untuk akuntansi keuangan agar dapat menjadi sumber bacaan dan acuan bagi pihak yang berkeinginan meneliti lebih lanjut mengenai kinerja keuangan dan implementasi environmental, social, dan governance (ESG) berdasarkan pedoman ESG Kementerian Keuangan Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktisi**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan, kebijakan dan pandangan kepada perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan aktivitas bisnis dan pengambilan keputusan yang relevan dengan konsep ESG (*environmental, social, governance*). Pencapaian kinerja keuangan perusahaan secara memadai tidak terlepas dari dukungan para stakeholder. Dukungan stakeholder hanya akan diberikan kepada perusahaan yang memprioritaskan keberlanjutan. Dengan penerapan ESG secara memadai dapat memungkinkan perusahaan di Indonesia untuk mempertahankan eksistensinya dalam jangka panjang.

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan kepada pemerintah Indonesia untuk mulai mempertimbangkan adanya regulasi lanjutan terkait ESG, khususnya kewajiban menerapkan dan mengungkapkan ESG oleh perusahaan Indonesia. Sehingga dimasa depan, penerapan dan pengungkapan ESG oleh perusahaan Indonesia dapat lebih memadai dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, dengan adanya regulasi yang lebih memadai diharapkan dapat menekan risiko pemberian informasi yang dapat menyesatkan stakeholder dalam mengambil keputusan